

**HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2014**

Oleh :

Aang Nofitra

Email : engdesignart@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 - 63277

Abstract

The purpose of the study to analyze and find out how much the level of education related to the political participation of the people in the general election of President and Vice President in 2014. The research problems are How Relationships level of education and political participation in the election of President and Vice President in the District Senapelan Pekanbaru 2014. the type of research used in this research is descriptive with quantitative approach. The data source consists of primary data from respondents beasal primary level a number of 48 respondents, 17 respondents secondary education, higher education amount to 35 respondents and secondary data. The sampling method used Taro Yamane formula and obtained a total sample of 100 respondents . Technical analysis of the data used is the Chi-Square Analysis (χ^2), crosstab, and hypothesis testing.

The results of this study showed that low levels of education dominated the partition of politics , after the chi-square test using SPSS there is no correlation level of education and political participation in District Senapelan Pekanbaru On elections of President and Vice President in 2014 and concluded that the level of education low can affect the height of political participation, vice versa. It is based on the categorization results that generate less educated people , in the category of high political participation relationship , which amounted to 57.1 % . An educated community medium , in the category of most low political participation , which amounted to 17.5 % . A highly educated society , in the category of political participation was as high as 25.4% . Regarding the relationship between the level of education to political participation occurred in Senapelan District entered into there was no correlation with the level of political participation of higher education in the District Senapelan City Pekanbaru the election of President and Vice President in 2014 based on the results of the calculation of the chi -square test using SPSS with value r of 0.330 ($2, N = 100$) = 2.216 ; $p > 0.05$) . It happens that there is no relationship between the level of higher education to political participation

keyword: education, political participation

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan asas-asas kedaulatan paham demokratis yang ditentukan oleh tangan rakyat, sehingga pada akhirnya akan terbentuklah suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemilihan umum, keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pembangunan dalam pemerintahan sebab melalui masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Pemilu menjadi suatu wadah yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Pada mulanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan pada akhirnya sekarang disepakati untuk melakukan secara langsung oleh rakyat sehingga pemilihan Presiden juga dimasukkan ke dalam agenda Pemilu. Pada 9 Juli 2014, Indonesia kembali melakukan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak disemua wilayah Indonesia dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten / Kota dan juga pemilihan presiden di luar negeri.

Setelah diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini pada tingkat kabupaten/kota tersebut kurang banyak mendapat minat dari masyarakat. Salah satunya Pilpres

yang dilaksanakan di Provinsi Riau, dimana data menunjukkan masyarakat yang ikut berpartisipasi pada Pilpres hanya sekitar 61,84 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Tingkat partisipasi yang rendah berlangsung di hampir seluruh daerah termasuk di Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau dengan kondisi yang lebih maju dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya terutama dibidang pendidikan dengan fasilitas dan kualitas yang baik sekaligus menjadi salah satu indikator partisipasi politik, dan seharusnya bisa mendorong tingginya partisipasi politik di kota Pekanbaru. Namun, pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya di kota Pekanbaru.

Berdasarkan data, partisipasi memilih pada Pilpres tahun 2014 tertinggi di Kecamatan Senapelan dengan persentase 67.31% , dan partisipasi terendah berada di kecamatan Pekanbaru Kota dalam persentase 46.64% dari data olahan yang di peroleh dari jumlah (DPT). Dalam kasus ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi rakyat dalam memberikan hak suaranya ada beberapa hal yaitu diantaranya umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, pendidikan dan pekerjaan.

Jumlah DPT pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pekanbaru adalah 627.212 pemilih. Dari data tersebut pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 354.425 sekitar 56.51% sungguh sangat ironis bahwa di Kota Pekanbaru jumlah partisipasi

politiknya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 masih dianggap rendah. Dan antusias dalam partisipasi politik bisa di bilang sangat minim. Secara

umum, wilayah-wilayah tertentu di Pekanbaru seperti partisipasi di sebuah kecamatan dirangkum dalam tabel berikut ini:

Partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Pilpres 2014 di Pekanbaru.

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Pengguna hak pilih	Persentase
1	Senapelan	23.548	15.849	67.31%
2	Rumbai Pesisir	44.839	30.120	67.17%
3	Rumbai	43.621	26.338	60.38%
4	Lima puluh	31.696	18.579	58.62%
5	Payung sekaki	62.786	36.407	57.99%
6	Bukit raya	65.364	37.182	56.88%
7	Sukajadi	34.661	19.029	54.90%
8	Tenayan raya	93.030	50.560	54.35%
9	Marpoyan damai	87.802	47.375	53.96%
10	Sail	16.955	9.078	53,54%
11	Tampar	100.693	53.547	53.18%
12	Pekanbaru kota	22.217	10.361	46.64%
	Jumlah	627.212	354.425	56.51%

Sumber: KPU Kota Pekanbaru tahun 2014

Pendidikan merupakan suatu aktifitas untuk meningkatkan pengetahuan umum pada masing-masing individu, dan termasuk didalamnya peningkatan dan penguasaan teori serta keterampilan dalam memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan yang mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu pendidikan yang tinggi sangat berpengaruh dalam memberikan informasi-informasi tentang politik dan persoalan tentang politik, serta bisa mengembangkan sebuah kecakapan dalam menganalisa dan menciptakan minat serta kemampuan berpolitik.

Sebanyak 67,31% masyarakat Kecamatan Senapelan yang

memberikan hak suaranya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014. Namun, apabila dilihat dari tingkat pendidikan tinggi, Kecamatan Senapelan hanya memiliki 3,84% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memberikan suaranya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014. Hal ini tentunya menjadi sangat menarik mengingat salah satu teori partisipasi politik mengatakan, bahwa apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat juga akan tinggi begitupula sebaliknya. Namun, di Kecamatan Senapelan yang memiliki tingkat pendidikan masyarakatnya cukup rendah, namun memiliki

tingkat partisipasi yang paling tinggi di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 lalu. Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini berjudul : “ **Hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tahun 2014**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan senapelan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik pada pilpres tahun 2014 di kecamatan senapelan Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak secara umum yaitu :

a. Bagi penulis dapat mengasah dan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan ilmiah.

b. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan pada pihak yang berkepentingan

berkaitan dengan tingkat pendidikan dalam mempengaruhi partisipasi politik.

c. Dan diharapkan dapat menambah referensi karya ilmiah dibidang ilmu sosial dan ilmu politik.

E. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi ialah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik atau disebut kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pemimpin secara langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contatcting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang melopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.²

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat :

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana

¹ A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007, Hal 285

² Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008, hal 367-368

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

2. Bentuk Partisipasi Politik

Pada dasarnya bentuk dari Partisipasi politik masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga tujuan, yaitu:

Pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuk beserta sistem politik yang disusunnya. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk mengirim utusan pendukung ke pusat pemerintahan, membuat pernyataan sikap mendukung kebijaksanaan pemerintahan, memilih calon yang ditawarkan oleh organisasi politik yang dibina ataupun dikembangkan oleh penguasa dan sebagainya.

Kedua, partisipasi politik dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan penguasa dengan harapan supaya penguasa mengubah atau memperbaiki kelemahan tersebut. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk petisi, resolusi, mogok, demonstrasi dan sebagainya. Di dalam ini disalurkan kepentingan para peserta partisipasi tersebut beserta keinginan masyarakat yang diwakilinya.

Ketiga, partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga terjadi perubahan pemerintah atau sistem politik. Mogok,

pembangkangan politik, huru hara dan pemberontak bersenjata dapat merupakan usaha untuk mencapai maksud tertentu. Apabila partisipasi politik yang pertama mendukung kekuatan pemerintah, maka yang kedua berusaha untuk melemahkan pemerintah. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga Negara.³

Menurut Gabriel A. Almond dalam buku perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan MacAndrews (1981), Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu :

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.

2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lezim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut **G. Almond** menyatakan bahwa "pendidikan tinggi, perbedaan jenis kelamin dan status ekonomi mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik. Faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu⁴ :

1) Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya

³ *Ibid*

⁴ *Ibid, Hal 14-16*

peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Makin tinggi pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikannya, makin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.

Menurut Dr. B. Siswanto Sastrohadwiryo berdasarkan sifatnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pendidikan Umum, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan diluar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh pengetahuan umum.
- b. Pendidikan Kejuruan, yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para peserta pendidikan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruannya.

- 2) Perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomi juga

mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi.

- 3) Media massa berfungsi sebagai penyampai informasi tentang perkembangan politik nasional maupun local.
- 4) Aktivitas kampanye. Biasanya kampanye-kempenye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara.

4. Pemilu Dan Sistem Pemilihan

1) Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden, Wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa.. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "**L**angsung, **U**mun, **B**ebas dan **R**ahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru⁵. Berikut pengertiannya yang bersifat:

- **Langsung** berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

- **Umum** berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Politik diakses

28/2/2015

• **Bebas** berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

2) Sistem pemilihan

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:⁶

a. *Single-Member*

Constituency(satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)

b. *Multi-member*

Constituency(satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan Sistem Perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional).

c. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat kami rumuskan, sebagai berikut :

H0. Tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014

Ha. Ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014

F. Konsep operasional dan Pengukuran

1. Konsep Operasional

Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting yang merupakan definisi yang dipakai para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena social atau fenomena alam Untuk menghindari kesalahan maupun keaburan didalam pengertian konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan batasan-batasan yang dipergunakan dalam tulisan ini. Adapun konsep operasional yang dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan (**X**) adalah usaha untuk membina kepribadian dan kemampuan manusia baik kemampuan jasmani maupun rohani yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah dan dalam masyarakat agar dengan kemampuannya dapat mempertahankan dan mengembangkan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

2. Partisipasi Politik (**Y**) adalah kegiatan warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3. Hubungan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.

2. Teknik Pengukuran

1. Pendidikan, dengan indikator:

a. Pendidikan formal:

⁶ *Op.cit*, Miriam Hal 461

- i) Pendidikan Dasar : TIDAK TAMAT SD, SD, Dan SLTP
 - ii) Pendidikan Lanjut: SLTA sederajat.
 - iii) Pendidikan Tinggi: Perguruan tinggi (Diploma/Sarjana) sederajat.
2. Partisipasi Politik, dengan indikator:
- a. Menberikan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Partisipasi dalam kampanye
 - c. Diskusi pemilihan
 - d. Menjadi anggota partai politik.

Setiap indikator Variabel akan di ukur dalam skala pengukuran 1 sampai 3 dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut : (1) YA dengan skornya (1). (2) TIDAK dengan skornya (2). (3) TIDAK TAHU dengan skornya (3).

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang artinya hasil penelitian berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.

1. Jenis Data

a. Data Primer merupakan data hasil dari kuisisioner/angket yang disebar di lokasi penelitian atau dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder merupakan data yang sudah jadi, seperti data jumlah pemilih, jumlah perolehan suara, jumlah tingkat pendidikan, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang

menggunakan hak pilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berada di Kecamatan Senapelan. Daftar pemilih tetap berjumlah 23.548. Jadi, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 23.548 orang.

b. Sample

Metode sampling yang digunakan adalah *sampling random sederhana* (*simple random sampling*) yaitu subjek yang dipilih dari populasi, dan karenanya seluruh anggota populasi mempunyai probabilitas yang untuk terpilih. Dalam penentuan sampel dilakukan dengan beberapa tahap *Pertama*, memilih Kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kecamatan berjumlah 6 Kelurahan.

6 kelurahan Proses pemilihan responden bisa dilakukan menggunakan acak sederhana (misal lewat angka yang diacak) dan dalam menentukan jumlah sampel pemilih di tiap-tiap kelurahan dilakukan secara acak (*random*), dan yang didasari atas beberapa pertimbangan yaitu :

1) Memilih kelurahan berdasarkan jumlah pemilih dengan persentase tertinggi dari beberapa kelurahan.

2) Mampu dijangkau berdasarkan kemampuan dana, tenaga dan waktu.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane, Jadi sampel yang diambil adalah dengan rumus , maka ditetapkan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{23548}{\dots}$$

$$23548 \cdot 0,01 + 1$$

$$n = \frac{23548}{236,48}$$

$$n = 99,57$$

$$n = 100$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Disamping itu, penelitian ini juga mengambil data dari media-media sebagai tambahan data bagi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan penyebaran kuesioner.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan program SPSS.. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data tersebut adalah sebagai berikut

- a) Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau memilah jawaban dari para responden dari hasil angket yang sudah disebarkan dan mengelompokkan jawaban para responden.
- b) Coding, merupakan pemberian tanda-tanda atau kode dalam setiap jawaban yang telah diberikan kepada responden.
- c) Tabulating, merupakan proses dimana data yang sudah diperoleh dari angket dan sudah dikelompokkan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan secara

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

langsung hasil penelitian tersebut. Tabulasi disini dapat berbentuk perasentase dari data statistik.

6. Teknik Analisis Data

Setelah langkah-langkah diatas selesai, selanjutnya adalah menganalisis data, Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisa data kuantitatif ini diperuntukkan untuk menjawab masalah penelitian yaitu Hubungan Tingkat Pendidikan dengan partisipasi politik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tahun 2014 .

Dalam penelitian ini, alat bantu analisis data kuantitatif yang digunakan ialah:

1. **Chi-square** digunakan untuk menguji persamaan antara model dengan data sebagai metode untuk menguji kesesuaian.

Rumus yang digunakan dalam analisis data kuantitatif untuk menghasilkan arah kecenderungan adalah :

Rumus *Chi-square* adalah :

$$X^2 = \sum_i \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \dots (10)$$

Ket:

O_{ij} = jumlah responden yang di observasi pada sel ke ij (nilai observasi)

E_{ij} = jumlah responden berdasarkan H_0 yang dikategorikan pada sel ke ij (nilai ekspektasi)

2. **Cross Tab (Tabel Silang)**, yaitu alat bantu analisis data yang digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel.

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal- kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

2. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang sangat strategis dan berada pada simpul segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia-Malaysia-Singapura.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Oleh karena itu, Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Pekanbaru juga merupakan jalur alternatif bagi wisatawan yang hendak menuju provinsi lain atau ke luar negeri.

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau ini memiliki Luas Wilayah 632,26 Km² dan berdasarkan letak geografisnya, Kota Pekanbaru berada pada posisi

101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dengan ketinggian sekitar 5 - 11 Meter dari permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. Daerah kota Pekanbaru yang memiliki ketinggian antara 1 sampai 20 meter dengan curah hujan dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 100 - 200 per bulan.

3. Keadaan Penduduk

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 937.939 jiwa. Dimana Kecamatan Tampan merupakan jumlah penduduk terbanyak yang berjumlah 179.470 jiwa dan Kecamatan Sail merupakan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 21.796 jiwa.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Di Kota Pekanbaru mata pencaharian masyarakatnya terbagi ke dalam beberapa sektor lapangan kerja, namun demikian yang paling dominan sebagai mata pencaharian masyarakat adalah pekerjaan pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Lapangan usaha terbanyak lainnya yaitu lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Kemudian lapangan usaha listrik, gas dan air relatif rendah.

5. Kondisis Sosial Budaya

Masyarakat Kota Pekanbaru sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, Masyarakat Pekanbaru merupakan masyarakat yang agamis. Mereka taat dalam menjalankan ajaran agama

yang dianutnya, sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memeluk agama Islam. Penduduk Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku di Indonesia kemudian tinggal dan menetap di Kota Pekanbaru. Beberapa suku yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Suku Melayu yang merupakan penduduk asli, Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Banjar, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Minangkabau dan suku lainnya seperti orang Cina dan India.

6. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kota Pekanbaru sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, Masyarakat Pekanbaru merupakan masyarakat yang agamis. Mereka taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memeluk agama Islam. Penduduk Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku di Indonesia kemudian tinggal dan menetap di Kota Pekanbaru. Beberapa suku yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Suku Melayu yang merupakan penduduk asli, Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Banjar, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Minangkabau dan suku lainnya seperti orang Cina dan India.

7. Administrasi

Kota Pekanbaru dibagi menjadi 12 Kecamatan dan 58 Desa/Kelurahan. Nama-nama Kecamatan beserta luas wilayah adalah sebagai berikut. Secara administratif Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58

Kelurahan, dengan luas wilayah 632,26 Km².

8. Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau

9. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “ Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa “.

B. Deskripsi Umum Kecamatan Senapelan

1. Sejarah Singkat Kecamatan Senapelan

Kecamatan Senapelan memiliki jumlah penduduk, sekitar 34.208 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Padang Trubuk, Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Kampung Bandar dan Kelurahan Kampung Baru.

2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Padang Bulan : 1,59 km²
- b. Kelurahan Padang Terubuk : 1,54 km²
- c. Kelurahan Sago : 0,68 km²
- d. Kelurahan Kampung Dalam : 0,68 km²
- e. Kelurahan Kampung Bandar : 1,19 km²
- f. Kelurahan Kampung Baru : 0,97 km²

Batas-batas wilayah

Kecamatan Senapelan adalah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.331 jiwa pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,87 persen dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 5.463 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah kelurahan Kampung Baru yaitu 9.574 jiwa/km².

4. Tingkat Pendidikan

Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk di kecamatan Senapelan didominasi oleh lulusan SLTA yakni sebesar 10.795 jiwa. Berikut dijelaskan melalui tabel mengenai tingkat pendidikan penduduk di kecamatan Senapelan pada tahun 2013.

Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Senapelan Tahun 2013

Kelurahan	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan								Jumlah
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/B elum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma I	Akademi/ Diploma III	Perguruan Tinggi/ Diploma IV	
Padang Bulan	1.438	1.035	1.811	1.998	3.086	76	145	465	10.054
Padang Terubuk	894	822	1.459	1.625	2.604	43	139	329	7.915
Sago	205	176	496	418	614	28	25	65	2.027
Kampung Dalam	388	310	713	672	725	25	18	44	2.896
Kampung Bandar	429	482	1.007	873	1.145	8	50	159	4.152
Kampung Baru	1159	929	2.070	1.968	2.621	41	164	335	9.287
Jumlah	4.512	3.754	7.556	7.554	10.795	222	541	1.397	36.331

Sumber : Badan Pusat Statistik 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Chi Square

Dasar pengambilan Keputusan dalam uji Chi-Square SPSS adalah berdasarkan nilai signifikansi :

1. Jika nilai *asympt signifikansi* < 0,05 maka H_a diterima
2. Jika nilai *asympt signifikansi* > 0,05 maka H_0 diterima

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

H_0 . Tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingginya

pertisipasi politik masyarakat di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014

H_a . Ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingginya pertisipasi politik masyarakat di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014

Hasil Chi-square Antara Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,216 ^a	2	,330
Likelihood Ratio	2,310	2	,315
Linear-by-Linear Association	1,006	1	,316
N of Valid Cases	100		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,40.

Berdasarkan hasil dari analisis chi-square dengan menggunakan SPSS di peroleh nilai signifikan sebesar 0,330, dimana 0,330 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014. Terjadi bahwa tingkat pendidikan rendah mampu

mencapai tingkat partisipasi politik yang tinggi

Cross Tab

Untuk melihat hubungan antar Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik maka dibuat lah tabel silang antara Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik dan di hasilkan dengan rumus Chi-square. Berikut tabel silang Tingkat Pendidikan dengan partisipasi Politik:

**Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Poilitik Pada Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
Tahun 2014**

X * partisipasipolitik Crosstabulation

		partisipasipolitik		Total	
		tinggi	rendah		
X	pendidikan rendah	Count	36	23	59
		Expected Count	37,2	21,8	59,0
		% within X	61,0%	39,0%	100,0%
		% within partisipasipolitik	57,1%	62,2%	59,0%
		% of Total	36,0%	23,0%	59,0%
	pendidikan sedang	Count	11	9	20
		Expected Count	12,6	7,4	20,0
		% within X	55,0%	45,0%	100,0%
		% within partisipasipolitik	17,5%	24,3%	20,0%
		% of Total	11,0%	9,0%	20,0%
	pendidikan tinggi	Count	16	5	21
		Expected Count	13,2	7,8	21,0
		% within X	76,2%	23,8%	100,0%
		% within partisipasipolitik	25,4%	13,5%	21,0%
		% of Total	16,0%	5,0%	21,0%
Total	Count	63	37	100	
	Expected Count	63,0	37,0	100,0	
	% within X	63,0%	37,0%	100,0%	
	% within partisipasipolitik	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	63,0%	37,0%	100,0%	

Berdasarkan tabel di atas hal ini di dasarkan pada hasil pengkategorian yang menghasilkan data, dari total rata-rata tergolong

tinggi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan rendah, masuk kategori hubungan partisipasi politiknya tinggi, yakni sebesar 57,1% dari total responden yang menjawab sesuai harapan. Masyarakat yang berpendidikan menengah masuk kategori paling rendah yaitu 17,5% dari total keseluruhan responden yang menjawab sesuai harapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru", dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik. Hal ini didasarkan pada hasil uji hipotesis Chi-square test diperoleh nilai signifikan sebesar ____ (2, N= 100)= 2,216; $p > 0,05$. Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi tidak menjamin partisipasi politik yang tinggi pula di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah tinggi, dikarenakan tingkat pendidikan rendah masyarakat Kecamatan Senapelan mampu mempengaruhi partisipasi, maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Senapelan masih mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan pola pikir yang tinggi dengan mengetahui berita

1. politik yang baik, sosialisasi yang baik mengenai partisipasi politik oleh pemerintah dan partai politik sehingga masyarakat yang kurang paham dalam hal politiknya dapat meningkatkan pengetahuan politiknya.

yang aktual mengenai politik dan pemerintahan sehingga bila diasumsikan partisipasi politik yang dilakukan mereka tinggi

SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, untuk itu penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Diperlukan sosialisasi mengenai partisipasi politik yang lebih intens oleh pemerintah dan partai politik agar masyarakat yang kurang dalam hal dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politiknya.
2. Diperlukan pendidikan politik yang lebih baik dari pemerintah dan partai politik terhadap masyarakat yang berpendidikan agar politik agar masyarakat berpendidikan menengah yang kurang dalam hal intensitas politiknya dapat meningkatkan partisipasi politiknya.
3. Diperlukan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik oleh masyarakat dalam kehidupan

bernegara baik dalam hal pemilihan umum, pendidikan politik yang baik, sosialisasi yang baik mengenai partisipasi politik oleh

pemerintah dan partai politik sehingga masyarakat yang kurang paham dapat memahami lebih luas tentang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik* ,Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- A.Rahman H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu,
- Sastroatmodjo Sidujoni. 1995. *Prilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press,
- Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat, Telaah Tentang Keterkaitan ORMAS, Partisipasi politik dan Pertumbuhan Hukum dan Hak Azasi*, PT. Rajawali, Jakarta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, P.T. Gramedia WidiaSarana Indonesia Jakarta
- Mochtar Mas'oe'd dan Cillin Mc Andrews. 2001. *Perbandingan Sisitem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Ramlani Lina Sinaulan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Zip Books
- Iqbal Hasan. 2011. *Analisa Data dengan Statistik* . Jakarta . Bumi Aksara
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2008. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip Unri*. Pekanbaru: UR Press
- Sufren dan yonathan natanael.2014.belajar Otodidak SPSS pasti Bisa. PT. Elex Media Komputindo , jakarta.
- Karya tulis ilmiah:**
PUTRA BANGUN, Kurnia. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Didalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 Di Kabupaten Karo*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- TADANUGI, Imanuel. *Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Poso Tahun 2010*. Diss. Program Pascasarjana Undip, 2012.
- EKO PRASOJO. "People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4.2 (2004)
- ARIF MASYHAR. "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP INTENSITAS PARTISIPASI POLITIK

MASYARAKAT DALAM
PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2009 (Studi pada
Kelurahan Yosorejo Kota
Metro) “Skripsi Ilmu
Pemerintahan Universitar
Lampung , 2010

Sumber lain :

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil
Presiden

Undang-Undang SISDIKNAS tahun
2003

www.kpu.pilpres2014.go.id
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan
umum di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia)
diakses 28/2/2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan
umum Presiden Indonesia
2014](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014) diakses 25/2/2015

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/1
23456789/29079/4/Chapter
%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29079/4/Chapter%20II.pdf) di akses 3/3/2015

[http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/fil
es/2012/06/ASPEK-
HUKUM-PEMILIHAN-
UMUM-PRESIDEN-DAN-
WAKIL-PRESIDEN.pdf](http://dodiharyono.staff.unri.ac.id/files/2012/06/ASPEK-HUKUM-PEMILIHAN-UMUM-PRESIDEN-DAN-WAKIL-PRESIDEN.pdf)
diakses 28/2/2015